

**DINAMIKA SISTEM SOSIAL EKONOMI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN
TAHUN 1945-1950****Umah¹, Tubagus Muhammad Damar Ilhami², Lulu Lutfiah³, Eko Ribawati⁴****Author Email: 2288230035@untirta.ac.id**

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No.25 Serang Banten, 42117, Telp / fax (0254)
280330

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial dan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1950, serta menganalisis dampak dari kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan pada masa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian historis (Kuntowijoyo, 2005) dan pendekatan studi pustaka (Zed, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat fondasi negara yang baru merdeka. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rusaknya infrastruktur, dan ancaman keamanan, langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan landasan pertama bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Dengan memahami dinamika sosial-ekonomi dan upaya pembangunan di periode awal kemerdekaan, diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pembangunan Indonesia di masa kini dan masa depan.

Kata Kunci: Ekonomi, Sosial, Inflasi, Infrastruktur, Blokade, Kemiskinan

ABSTRACT

This research aims to examine the social and economic conditions of post-independence Indonesia from 1945 to 1950, as well as analyze the impact of development policies and programs implemented during that period. The research methods used are historical research methods (Kuntowijoyo, 2005) and literature study approaches (Zed, 2004). The research results show that the Indonesian government is trying to formulate social and economic policies to improve people's welfare, build infrastructure, encourage economic growth, and strengthen the foundations of the newly independent country. Despite challenges such as limited resources, damaged infrastructure and security threats, the steps taken by the government are the first foundation for Indonesia's future development. By understanding the socio-economic dynamics and development efforts in the early period of independence, it is hoped that it can provide valuable learning for Indonesia's development in the present and future.

Key Word: Economy, Social, Inflation, Infrastructure, Blockade, Poverty

PENDAHULUAN

Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda. Pasca kemerdekaannya, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kembali negara dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang telah terpuruk akibat penjajahan berkepanjangan. Periode awal kemerdekaan merupakan masa transisi yang krusial bagi Indonesia untuk meletakkan fondasi pembangunan nasional.

Secara sosial, Indonesia pasca kemerdekaan menghadapi masalah kemiskinan yang meluas, tingkat pendidikan yang rendah, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, serta ketimpangan yang besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini diperparah oleh konflik internal yang terjadi di berbagai daerah, serta masalah sosial lainnya seperti pengangguran dan kriminalitas. Namun, di sisi lain, semangat kebangsaan dan keinginan

untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat juga sangat kuat di kalangan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Perekonomian nasional saat itu masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam, sementara infrastruktur dan industri manufaktur masih belum berkembang. Inflasi dan kekurangan pasokan bahan pangan juga menjadi masalah utama yang harus dihadapi. Selain itu, sistem keuangan dan perbankan masih dalam tahap awal pembentukan, sehingga akses terhadap modal dan investasi menjadi terbatas.

Menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang penuh tantangan ini, pemerintah Indonesia saat itu berupaya untuk merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat fondasi negara yang baru merdeka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kondisi sosial dan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan, serta menganalisis dampak dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan pada masa itu. Dengan memahami dinamika sosial-ekonomi dan upaya pembangunan di periode awal kemerdekaan, diharapkan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pembangunan Indonesia di masa kini dan masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian historis (Kuntowijoyo, 2005) dan pendekatan studi pustaka (Zed, 2004). Pertama penulis menentukan tema atau topik yang akan dibahas. Kemudian berikutnya mengumpulkan sumber-sumber yang dianggap sesuai dan relevan sebagai dasar penulisan artikel ini. Sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber sekunder hasil penelitian baik berupa buku maupun jurnal. Beberapa sumber yang telah terkumpul kemudian di analisis untuk dicari fakta-fakta yang saling berkesinambungan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran fakta yang objektif. Kemudian, penulis menginterpretasi substansi dari informasi yang telah di dapatkan untuk kemudian dielaborasi menjadi sebuah tulisan/historiografi.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Pasca Kemerdekaan

1. Kondisi demografi dan kependudukan

Pada tahun 1945 hingga 1950, Indonesia sedang dalam proses perubahan dan perkembangan setelah merdeka dari penjajahan Belanda. Saat itu, situasi demografi dan kependudukan Indonesia masih tergolong muda fluktuatif. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 69,5 juta jiwa pada tahun 1950, menduduki peringkat ketujuh di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang, dan Jerman. Saat itu, struktur usia penduduk Indonesia masih tergolong muda, dengan rasio ketergantungan usia yang tinggi serta potensi tabungan dan investasi yang rendah. Angka kelahiran yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat, sedangkan angka kematian yang rendah dapat meningkatkan angka ketergantungan pada hari tua.

Perubahan demografi pada periode ini dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi penduduk. Urbanisasi dan imigrasi dimulai pada periode ini. Faktor penarik seperti upah yang lebih tinggi di perkotaan, peningkatan jumlah dan kesempatan kerja, serta peluang pendidikan dan rekreasi yang lebih baik mempengaruhi migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Saat itu kepadatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah dan jumlah penduduk per kilometer persegi belum terlalu tinggi.

Ringkasnya, keadaan demografi dan kependudukan Indonesia masih dalam tahap berkembang setelah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1950.

Perubahan demografi dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan pergerakan penduduk, yang mempengaruhi struktur umur dan kepadatan penduduk. Selama periode ini, urbanisasi dan migrasi dimulai, menciptakan faktor-faktor menarik seperti upah yang lebih tinggi dan kesempatan pendidikan dan rekreasi yang lebih baik di daerah perkotaan.

2. Pendidikan dan kesehatan masyarakat

Kondisi pendidikan yang berlaku di Indonesia pasca kemerdekaan membawa perubahan pada proses pembelajaran dan prasarana pendidikan. Maka di era pendidikan ini bangsa Indonesia mengusir ide-ide pendidikan dari Belanda. Oleh karena itu, pelajar Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dalam dunia pendidikan. Menambahkan budaya Indonesia yang berbeda menciptakan pembelajaran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pendidikan di Indonesia pada abad 21 merupakan abad globalisasi. Pada masa ini, pembelajaran tidak hanya terfokus pada budaya saja, namun juga pada pemikiran kritis dan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi dan kolaborasi. Sejak saat itu, seluruh kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saat itu, jenjang pendidikan minimal di Indonesia adalah sekolah dasar yang lamanya enam tahun. Anak usia 7 tahun ke atas boleh masuk SR. Setelah lulus sekolah negeri, kamu bisa masuk sekolah menengah pertama. Pendidikan menengah kemudian dibagi menjadi dua jenjang: Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SLTA), masing-masing berlangsung selama tiga tahun. Tahap akhir sekolah ini dibagi menjadi tiga bagian: sekolah menengah reguler, sekolah kejuruan, dan sekolah pelatihan guru. Setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan ke universitas.

Pada awal Mei 1948, Kementerian Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan, atas usulan Kementerian Dalam Negeri, mendirikan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta untuk melatih calon pegawai Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Penerangan. Akademi ini awalnya dipimpin oleh seorang profesor. Joko Soetno, S.H. Sayangnya akademi ini tidak bertahan lama. Ketika pecah pemberontakan Madiun-PKI pada bulan September 1948, akademi tersebut ditutup karena ditinggalkan oleh para mahasiswa yang turut serta dalam menumpas pemberontakan tersebut.

Selanjutnya, atas kerja sama antara Departemen Pendidikan, Bimbingan dan Kebudayaan dengan Departemen Kehakiman, didirikanlah Pusat Pelatihan Profesi Hukum di Surakarta pada tanggal 1 November 1948. Bersamaan dengan itu, Panitia Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Surakarta yaitu Dr. Notonagoro, S.H., Koesoedi, S.H. dan Hardjono, S.H. Berencana mendirikan perguruan tinggi hukum negeri di Surakarta. Untuk meningkatkan efisiensi, panitia mengusulkan penggabungan Pusat Pendidikan Profesi Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Negeri, yang akhirnya dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1948.

Pada akhir masa penjajahan Jepang, demam merah merupakan salah satu penyakit yang banyak menyerang penduduk kota Jakarta. 156 orang terinfeksi, rata-rata 150 hingga 600 orang meninggal. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan Kota (DKK) DKI Jakarta, tingginya angka penularan di kalangan warga disebabkan oleh kekurangan pangan dan memburuknya kebersihan lingkungan. Pada masa penjajahan Jepang, pasien di bagian penyakit umum DKK berjumlah 353 orang. 506 di antaranya menderita penyakit malaria. Penduduk desa juga terkena dampak Framboise, dengan 508 kasus terdaftar. Pihak berwenang kini melarang pencatatan edema Honger (edema kelaparan), meski sebenarnya terjadi dalam jumlah besar.

Selain itu, terbatasnya jumlah tenaga kesehatan berarti mereka harus bekerja dengan peralatan medis dan obat-obatan yang minim. Saat itu, jumlah rumah sakit

masih sangat sedikit. Dokter seringkali harus mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan peralatan praktik. Untungnya, Palang Merah memberikan bantuan dan DKK mampu mendirikan 83 pos pertolongan pertama dan kecelakaan di seluruh Jakarta. Selain perang, berbagai penyakit juga menjadi penyebab kematian masyarakat. Berdasarkan laporan Kementerian Penerangan Jakarta Raja, Republik Indonesia, DKK mencatat 248 kematian pada tahun 1946, dimana 202 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dan 930 orang meninggal karena disentri, termasuk 256 orang Indonesia. Malaria juga menjadi penyakit mematikan yang mengancam warga Jakarta. Dalam 20 bulan pertama kemerdekaan, 195 orang mencari pengobatan untuk penyakit malaria.

Untuk mengatasi hal tersebut, DKK akhirnya mendistribusikan kina kepada masyarakat. Penyakit yang juga diderita warga Jakarta antara lain demam tifoid (545 pasien), demam tifoid (21 pasien), dan penyakit Fransiskan (8574 pasien). Rumah Sakit Rakyat Bidala China berperan penting dalam menerima dan memberikan pelayanan medis kepada pasien yang tidak dapat dirawat di Rumah Sakit Pendidikan Tersier (RSPT).

3. Budaya dan nilai-nilai sosial

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi perubahan sosial budaya khususnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab, sebelum proklamasi kemerdekaan, kehidupan masyarakat Indonesia diwarnai dengan diskriminasi rasial akibat pembagian kelas sosial. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia didominasi oleh bangsa Eropa dan Jepang, sehingga masyarakat pribumi sebagian besar hanyalah rakyat jelata yang menjadi budak bangsawan dan penguasa. Namun setelah deklarasi ini, segala bentuk diskriminasi rasial di Indonesia dihapuskan dan seluruh warga negara Indonesia diberikan hak dan tanggung jawab yang sama dalam segala bidang.

Adapun perubahan kondisi atau kehidupan sosial budaya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain :

- **Pendidikan**

Pada dasarnya pendidikan di Indonesia sudah dimulai ketika pemerintahan Belanda melalui Ratu Wihelmina melakukan politik budi (edukasi, irigasi, dan migrasi). Meskipun masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tersentuh pendidikan dan mengalami buta huruf. Akan tetapi perubahan paling mendasar adalah mulai digunakannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan setelah kemerdekaan dan sebagai bahasa pemersatu bangsa.

- **Seni Sastra**

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sejalan dengan perkembangan sastra di Indonesia. Dimana, perubahan seni sastra mulai mengalami perkembangan ketika sastrawan angkatan 45 seperti HB. Jassin, Rosihan Anwar, Chairil Anwar, dan Idrus tergabung dalam angkatan pujangga baru dan membawa warna baru dalam seni sastra di Indonesia.

- **Seni Rupa**

Perubahan seni rupa tampak pada pendirian perkumpulan seni rupa yang digunakan sebagai wadah para seniman seperti Pelukis Indonesia (PI), dan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI).

- **Perfilman**

Perubahan dalam bidang perfilman terjadi perubahan dengan pendirian Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) di bawah kepemimpinan Usmar Ismail, dan muncul juga Perusahaan Film Negara (PFN).

- **Pers**

Perubahan dalam bidang pers terjadi ketika mulai muncul surat kabar asli Indonesia, yang menunjukkan semangat anti Belanda seperti *Republiken*.

4. Isu-isu sosial yang menonjol (seperti kemiskinan, ketimpangan, dll.)

Setelah kemerdekaan Indonesia, dari tahun 1945 hingga 1950, terdapat beberapa masalah sosial yang besar:

Kesulitan ekonomi, akibat inflasi yang sangat tinggi, kekurangan dana, dan blokade ekonomi Belanda, situasi perekonomian Indonesia memburuk secara signifikan. Pemerintah tidak mampu mengendalikan peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong.

Kemiskinan dan Kelaparan, banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya karena kekurangan uang dan makanan. Jumlah orang yang menderita kelaparan menurun tajam sejak tahun 1970an hingga 1980an.

Pemberontakan Komunis, pemberontakan di Republik Soviet Indonesia dideklarasikan oleh anggota PKI di Madiun, yang berakhir dengan kemenangan TNI dan pembunuhan pemimpin PKI. Kemenangan ini menghilangkan gangguan dari perjuangan revolusioner nasional dan memperkuat simpati Amerika.

Keadaan pendidikan saat ini, pendidikan nasional yang bertujuan untuk membina warga negara yang bersosialisasi, demokratis, dan bertanggung jawab, masih berada dalam situasi yang sulit. Praktik pendidikan pascakolonial menekankan pada penanaman patriotisme.

Kondisi sosial lainnya, permasalahan kemanusiaan dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia pasca pendudukan dan revolusi Jepang sangat besar, antara lain blokade Belanda terhadap Indonesia dan eksploitasi besar-besaran pada masa penjajahan.

B. Kondisi Ekonomi Pasca Kemerdekaan

Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Keadaan ekonomi negara sebagai bangsa yang masih muda menjadi perhatian utama setelah kemerdekaan. Akibat banyaknya mata uang, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, yang kemudian menjadi tidak terkendali. Menurut informasi yang diterbitkan oleh *Economics and Business Journal* tahun 2012, ketidakmampuan pemerintah di Belanda dan Jepang untuk mengontrol mata uang asing adalah penyebab inflasi atau hiperinflasi yang sangat tinggi. Selain itu, uang tunai, pajak negara, dan bea masuk tidak ada. Belanja pemerintah sebaliknya meningkat.

Karena petani adalah orang yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang, merekalah yang paling terkena dampak dari inflasi yang sangat menindas ini. Selain itu, Belanda menghalangi ekspor Indonesia dengan menutup atau memblokir pintu perdagangannya dengan Indonesia.

Dengan adanya blokade, Belanda sangat ingin rakyat Indonesia menderita, dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Akibatnya masyarakat mulai membenci pemerintah Indonesia. Menurut informasi yang dimuat di situs resmi Bank Indonesia, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyetujui tiga mata uang untuk diakui di Indonesia mulai tanggal 1 Oktober 1945. Mata Uang Bank De Javasche, Mata Uang Pendudukan Jepang, dan Pengenal Mata Uang Bank Indonesia Pemerintah Belanda. Faktanya, pada hari-hari pertama setelah kemerdekaan, Indonesia sama sekali tidak mampu mencapai pembangunan ekonomi yang optimal. Kemerdekaan perlu dipertahankan sampai tahun 1949. Setelah kemerdekaan, sentralisasi sektor pembangunan dilakukan melalui jalur politik. Baru pada tahun 1950, Indonesia mampu mencapai pembangunan ekonomi.

Pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950, keadaan perekonomian (keuangan) Indonesia sangat memprihatinkan. Penyebabnya yaitu:

1. Inflasi yang sangat tinggi disebabkan oleh tidak diaturnya peredaran berbagai mata uang. Pada saat ini, pemerintah Indonesia untuk sementara waktu menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya mata uang Bank Javasase, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
2. Kemudian, pada tanggal 6 Maret 1946, ketika kesulitan ekonomi mempengaruhi penduduk Indonesia, komandan baru AFNEI, Letnan Jenderal Montague Stopford, mengumumkan masuknya dana NICA ke wilayah yang diduduki Sekutu. Koin NICA ini diciptakan sebagai pengganti koin Jepang yang nilainya turun drastis. Pemerintahan Perdana Menteri Shahrir sedang menangani kasus ini. Artinya Sekutu akan mengingkari kesepakatan bahwa tidak akan ada mata uang baru kecuali ada solusi politik terhadap status Indonesia. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru untuk menggantikan uang kertas Jepang, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia). Berdasarkan teori moneter, banyaknya uang yang beredar berpengaruh terhadap kenaikan harga.
3. Sejak November 1945, terjadi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda untuk memutus perdagangan luar negeri Indonesia. Ini menyebabkan kekurangan pasokan bahan pangan dan barang kebutuhan pokok, yang semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
4. Perbendaharaan kosong.
Sistem ekonomi Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan kolonial. Kekayaan dan hasil sumber daya alam Indonesia sebagian besar dialirkan ke Belanda. Selain itu juga, Indonesia harus menghadapi Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Perang ini menghabiskan banyak dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi.
5. Eksploitasi kolonial secara besar-besaran.
Eksploitasi kolonial secara besar-besaran yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia selama masa penjajahan menyebabkan kondisi negara Indonesia pada awal kemerdekaan menjadi sangat memprihatinkan, terutama dari segi ekonomi dan keuangan negara. Pemerintah kolonial memberlakukan sistem-sistem yang merugikan untuk bangsa Indonesia, seperti:
 - Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa di Indonesia pada abad ke-19. Sistem ini memaksa petani untuk menyediakan sebagian lahan dan tenaga kerjanya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan tebu untuk kepentingan Belanda. Hasil panen kemudian diambil oleh Belanda, sementara petani hanya diberi sedikit upah.
 - Eksploitasi Sumber Daya Alam
Belanda secara besar-besaran mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia seperti minyak, gas bumi, timah, karet, dan hasil tambang lainnya. Kekayaan ini diambil dan dialirkan ke Belanda, sementara Indonesia tidak mendapat banyak keuntungan.
 - Monopoli Perdagangan
Belanda mempertahankan monopoli perdagangan di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Barang-barang hasil bumi Indonesia harus dijual ke Belanda dengan harga yang murah, sementara barang-barang dari Belanda dijual ke Indonesia dengan harga tinggi.
 - Pajak Tinggi
Belanda memberlakukan sistem perpajakan yang sangat tinggi bagi rakyat Indonesia, tetapi hasil pajaknya kemudian dialirkan ke Belanda dan tidak digunakan untuk pembangunan di Indonesia sendiri.

Blokade Ekonomi Belanda terhadap Republik Indonesia

Inflasi di Indonesia terus meningkat. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya inflasi, antara lain:

1. Peredaran uang Rupiah (Jepang) yang tidak terkendali.
2. Pemerintah tidak mempunyai kendali terhadap mata uang asing yang beredar di Indonesia, khususnya mata uang Jepang dan Belanda.
3. Perbendaharaan dan Bea Cukai kosong.
4. Pemerintah terpaksa mengembangkan kebijakan yang menyatakan keabsahan beberapa mata uang asing sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ada tiga jenis mata uang: Mata Uang Bank Jawa, Mata Uang Pemerintah Hindia Belanda, dan Mata Uang Pendudukan Jepang.

Dampak inflasi terutama dirasakan oleh petani. Sebab, pada masa penjajahan Jepang, petani merupakan produsen yang menyimpan dan memiliki sebagian besar mata uang Jepang. Blokade tersebut juga akan menutup pintu perdagangan Indonesia dan menghambat ekspor barang-barang Indonesia. Belanda memberlakukan blokade karena:

1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah ekspor produk perkebunan Belanda dan asing lainnya.
3. Melindungi WNI dari perbuatan dan perbuatan orang asing.

Harapan Belanda untuk mencapai hal tersebut Lockdown mengakibatkan memburuknya kondisi sosial- kondisi perekonomian, yang mengakibatkan kekurangan impor yang sangat dibutuhkan, inflasi yang tidak terkendali, dan ketakutan serta kerusuhan sosial yang berujung pada kebencian terhadap pemerintah republik.

Usaha-Usaha Yang Dilakukan Untuk Menembus Blokade Ekonomi

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surachman pada bulan Juli 1946 dengan persetujuan BP-KNIP.
2. Upaya mendobrak blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500.000 ton. Menjalinkan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan mematahkan blokade Belanda di Sumatera dengan Singapura dan Malaysia sebagai tujuannya.
3. Konferensi ekonomi yang dilaksanakan pada bulan Februari 1946 dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan suara bulat untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta kondisi dan pengelolaan perkebunan.
4. Komisi Perencanaan (Komisi Perencanaan Ekonomi) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947. Komisi perencanaan ini merupakan badan tetap yang bertugas mengembangkan rencana pembangunan ekonomi untuk dua hingga tiga tahun.
5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Bersenjata (Rera) 1948 yaitu mantan prajurit dialihkan ke bidang produktif.
6. Kemudian, sebagai Menteri Perbekalan Pangan Umum, I.J. Cassimo membuat rencana produksi lima tahun yang disebut Plan Cassimo, diantaranya:
 - a) Peningkatan kebun benih dan padi kualitas tinggi.
 - b) Pencegahan penyembelihan hewan ternak.
 - c) Reboisasi kawasan belum berkembang.
 - d) Perpindahan penduduk (reinkarnasi).

C. Kebijakan dan Program Pembangunan**1. Kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial**

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga 1950, beberapa kebijakan pemerintah di bidang sosial tercantum di bawah ini:

- Berdirinya Departemen Sosial Tahun 1945, tujuannya untuk mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Dan fokusnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, antara lain fakir miskin, anak yatim, dan penyandang disabilitas.
- Pembentukan Badan Kerja Badan Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tahun 1945, tujuannya untuk membantu pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial. Dan fokusnya adalah mengatasi masalah sosial seperti pengungsi, korban perang, dan penyandang disabilitas.
- Berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tahun 1946, tujuannya untuk memberikan bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan fokusnya adalah memberikan pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Diperkenalkannya Sistem Jaminan Sosial pada tahun 1947, tujuannya agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat. Dan fokusnya adalah memberikan asuransi Kesehatan, Pensiun, Kecelakaan Kerja.

2. Kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga 1950, beberapa kebijakan pemerintah di bidang sosial tercantum di bawah ini:

- Berdirinya Departemen Sosial Tahun 1945, tujuannya untuk mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Dan fokusnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, antara lain fakir miskin, anak yatim, dan penyandang disabilitas.
- Pembentukan Badan Kerja Badan Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tahun 1945, tujuannya untuk membantu pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial. Dan fokusnya adalah mengatasi masalah sosial seperti pengungsi, korban perang, dan penyandang disabilitas.
- Berdirinya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tahun 1946, tujuannya untuk memberikan bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan fokusnya adalah memberikan pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Diperkenalkannya Sistem Jaminan Sosial pada tahun 1947, tujuannya agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat. Dan fokusnya adalah memberikan asuransi Kesehatan, Pensiun, Kecelakaan Kerja.

3. Dampak dari Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah

Dampak kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950

- Dampak Sosial:
Pemerintah dengan melindungi hak-hak rakyat Indonesia Kami melaksanakan program dekolonisasi. Rakyat Penduduknya kembali kepada orang-orang Indonesia yang dirampas oleh penjajah Belanda. Hal ini berdampak positif berupa menguatnya rasa nasionalisme dan solidaritas masyarakat. Upaya pemerataan pendidikan dan kesehatan masih terbatas, namun kesejahteraan masyarakat berangsur-angsur membaik. Namun, kesenjangan sosial yang cukup besar masih terjadi, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Dampak Ekonomi;
Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi nasionalis dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Hal ini memperkuat kontrol pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi strategis. Berbagai upaya sedang dilakukan

untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur dasar seperti transportasi dan energi, namun upaya tersebut masih terbatas. Namun kondisi perekonomian masih sangat memprihatinkan akibat dampak Perang Kemerdekaan dan ketergantungan pada impor.

Secara umum, efektivitas dari kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi pasca kemerdekaan disebabkan oleh berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, rusaknya infrastruktur, dan ancaman keamanan akibat kerusuhan sosial politik. Namun demikian, langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan landasan pertama bagi pembangunan Indonesia di masa depan.

D. Tantangan dan Peluang Pembangunan

Pada masa pasca kemerdekaan, negara Indonesia dihadapi beberapa tantangan dalam kondisi keadaan sosial-ekonomi, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal nya.

1. Tantangan internal

- a. **Korupsi dan Nepotisme**
Korupsi dan nepotisme merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.
- b. **Ketimpangan Sosial Ekonomi**
Ketimpangan antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi tantangan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- c. **Keterbatasan Infrastruktur**
Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, listrik, dan air bersih, menjadi hambatan dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. **Ketidakpastian politik**
dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan investasi. Ketidakpastian politik juga dapat memengaruhi kebijakan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan.
- e. **Keterbatasan Akses**
Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan di beberapa daerah di Indonesia.

2. Tantangan eksternal

- a. **Krisis Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global**, seperti krisis keuangan global, harga komoditas yang tidak stabil, dan ketidakpastian ekonomi global, dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi Indonesia.
- b. **Perubahan Iklim Global: Perubahan iklim global** dapat berdampak pada sektor ekonomi tertentu di Indonesia, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- c. **Krisis Kesehatan Global: penurunan permintaan global**, dan gangguan rantai pasokan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.
- d. **Ketidakstabilan Politik Regional: Ketidakstabilan politik** di wilayah sekitar Indonesia, seperti konflik di negara tetangga atau ketegangan geopolitik, dapat memengaruhi iklim investasi dan perdagangan Indonesia.
- e. **Perdagangan Internasional: Perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional**, perjanjian perdagangan regional, dan sengketa perdagangan antar negara dapat memengaruhi ekspor dan impor Indonesia serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

3. Peluang pembangunan di bidang sosial dan ekonomi Setelah kemerdekaan

Indonesia memiliki berbagai peluang pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi sosial dan ekonomi negara. Berikut adalah beberapa peluang pembangunan di bidang sosial dan ekonomi pada masa pasca kemerdekaan Indonesia:

- a. Ekonomi Sosial Baru
- b. Jalur Menuju Indonesia yang Damai dan Makmur pada Tahun 2045.
- c. Pandangan Umum tentang Indonesia.

KESIMPULAN

Keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan pada masa awal sangat buruk karena Inflasi tinggi, blokade ekonomi oleh Belanda, perbendaharaan kosong, dan eksploitasi kolonial yang besar-besaran. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintahan melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendesak, termasuk pembentukan Planning Board untuk merancang rencana pembangunan ekonomi jangka panjang. Blokade Belanda terhadap Indonesia pasca kemerdekaan menyebabkan inflasi meningkat, yang berdampak terutama pada petani dan perdagangan negara. Blokade tersebut dilakukan dengan tujuan tidak hanya keamanan, tetapi juga untuk memperburuk kondisi ekonomi dan sosial Indonesia guna memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah republik. Usaha-usaha Indonesia untuk menembus blokade ekonomi Belanda pasca kemerdekaan melibatkan diplomasi beras ke India dan menjalin hubungan dagang dengan luar negeri, termasuk perusahaan swasta Amerika Serikat. Tindakan tersebut membantu mengatasi blokade dan membuka jalur perdagangan baru bagi Indonesia.

Dalam konteks kebijakan sosial, pemerintah Indonesia pada masa pasca kemerdekaan berfokus pada memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan sistem jaminan sosial untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat. Di bidang ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi nasionalis dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan berupaya melaksanakan program pembangunan infrastruktur dasar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kebijakan dan program pemerintah tersebut memberikan dampak positif dalam menguatkan rasa nasionalisme dan solidaritas masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan sosial yang perlu diperhatikan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulkarnain dan Anisa Onifah, KEADAAN SOSIAL EKONOMI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA
- Kartodirdjo, S. (1987). PENGANTAR SEJARAH INDONESIA BARU: 1500-1900. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wie, T. K. (1978). EDUCATION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 14(1), 85-104.
- Mahardika, M. D. G. (2022). Titik Balik Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perspektif Materialisme Historis. Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah, 2(2), 55-64. ISSN 2776-2998 (online).
- Radyati M. N., Tjahjono Benny. The New Social Economy in Indonesia: Features, Recent Development and Challenges. (2021). Economics, Sociology